



**Analisis Kebijakan Pendidikan Program Alazka Islamic Character Building
pada Salah Satu SD Islam di Surabaya**

**Zuanita Shofia Ade Kurnia *, Erny Roesminingsih, Murtadlo, Mufarrihul Hazin, and
Amrozi Khamidi**

Prodi S2 Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

*Email: zuanita1988@gmail.com

Abstrak

Era digital menuntut lembaga pendidikan dasar tidak hanya unggul dalam aspek teknologi, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai karakter Islami yang kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Program Alazka Islamic Character Building (A-ICB) pada salah satu SD Islam di Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan publik berdasarkan model William N. Dunn, Edward III, serta Howlett & Ramesh, yang mencakup enam dimensi utama: konten, agenda setting, formulasi, aktor, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan A-ICB ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah dan mengintegrasikan nilai Rabbaniyah, Ilmiah, Insaniyah, dan Alamiyah ke dalam pembelajaran, pembiasaan, dan berbagai kegiatan sekolah. Pelaksanaan kebijakan didukung oleh aktor internal dan eksternal dengan struktur organisasi serta panduan teknis yang jelas. Namun demikian, ditemukan kesenjangan pemahaman di antara pelaksana serta kurang optimalnya pengukuran capaian karakter secara objektif. Disimpulkan bahwa A-ICB merupakan strategi kebijakan yang relevan dan adaptif dalam membangun karakter Islami peserta didik di tengah tantangan digitalisasi. Penelitian ini memberikan dampak positif berupa model implementasi pendidikan karakter Islami yang kontekstual dan aplikatif, yang dapat direplikasi oleh lembaga pendidikan dasar Islam lainnya. Selain itu, hasil penelitian ini mendorong pentingnya penguatan pelatihan guru, evaluasi berbasis data, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem pendidikan karakter yang berkelanjutan dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Kata kunci: Kebijakan Pendidikan, Karakter Islami, Islamic Character Building, Pendidikan Dasar, Analisis Kebijakan

***Analyze the educational policy of the Alazka Islamic Character Building (A-ICB)
programme at an Islamic Elementary School in Surabaya***

Abstract

The digital era requires primary education institutions not only to excel in technological aspects but also to instill contextual Islamic character values. This study aims to analyze the educational policy of the Alazka Islamic Character Building (A-ICB) Program at an Islamic Elementary School in Surabaya. Employing a qualitative approach, this research uses public policy analysis methods based on the models of William N. Dunn, Edward III, and Howlett & Ramesh, covering six key dimensions: content, agenda setting, formulation, actors, implementation, and evaluation. Data were collected through interviews, documentation, and observation. The findings indicate that the A-ICB policy is established through a Principal's Decree and integrates the values of Rabbaniyah (spirituality), Ilmiah (knowledge), Insaniyah (humanity), and Alamiyah (environmental awareness) into learning, habituation, and school activities. Policy implementation is supported by both internal and external actors through a well-defined organizational structure and technical guidelines. However, the study also reveals a gap in understanding among implementers and the suboptimal measurement of character development outcomes. It is concluded that A-ICB represents a relevant and

adaptive policy strategy for fostering Islamic character in students amidst the challenges of digitalization. This research contributes positively by offering a contextual and applicable model of Islamic character education, which can be replicated by other Islamic primary schools. Furthermore, the findings emphasize the need for strengthened teacher training, data-driven evaluation, and multi-stakeholder collaboration to create a sustainable and responsive character education ecosystem.

Keywords: Education Policy, Islamic Character, Islamic Character Building, Elementary Education, Policy Analysis

Histori Naskah

Diserahkan: 22 Mei 2025

Direvisi: 13 Juli 2025

Diterima: 17 Juli 2025

How to cite:

Kurnia, Z.S.A., et al. (2025). Analisis Kebijakan Pendidikan Program Alazka Islamic Character Building pada Salah Satu SD Islam di Surabaya. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(1), 34-48. DOI: <https://doi.org/10.58706/jipp.v4n1.p34-48>.

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter terus menjadi perhatian utama dalam pengembangan kurikulum di Indonesia, khususnya dalam menjawab tantangan digitalisasi, krisis moral, dan dekadensi nilai sosial di kalangan generasi muda. Sejumlah penelitian telah menegaskan pentingnya karakter sebagai tujuan esensial pendidikan. Lickona menyebutkan bahwa penguatan karakter perlu dilakukan melalui proses menyeluruh yang melibatkan moral knowing, moral feeling, dan moral action (Rahmawati, 2022). Dalam konteks pendidikan Islam, nilai-nilai religius menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter siswa (Muslich, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Khotimah (2023) membuktikan bahwa integrasi nilai religius dalam pembelajaran tematik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan moralitas siswa. Selain itu, Nurhayati (2020) menekankan bahwa keteladanan guru memegang peran penting dalam pembentukan moralitas peserta didik. Nizar et al. (2025) dan Wahyuni (2021) juga menyoroti peran keluarga dan masyarakat sebagai elemen penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan karakter. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi dalam implementasi pendidikan karakter. Fauzi dan Fika (2023) menemukan adanya kelemahan dalam sistem monitoring pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter di pesantren, sementara Sari dan Prabawati (2022) mengidentifikasi kurangnya analisis masalah pada tahap perumusan kebijakan sebagai salah satu faktor penghambat optimalisasi program pendidikan karakter.

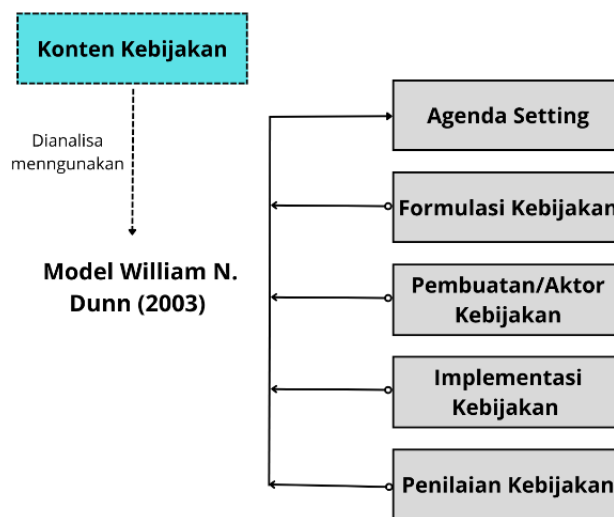
Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2021) dan Maulida (2020) menekankan urgensi penguatan kurikulum karakter yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Qurtubi (2022) menunjukkan bahwa efektivitas program pendidikan karakter sangat dipengaruhi oleh keberadaan standar operasional prosedur (SOP) serta peran aktor pelaksana. Dalam perspektif kebijakan publik, Howlett dan Ramesh (2003) serta Dunn (2003) menegaskan pentingnya partisipasi aktor dan pelaksanaan evaluasi berkelanjutan pada setiap tahap siklus kebijakan. Penelitian terbaru oleh Hidayatulloh (2024) mengungkap praktik sinergi antara sistem sekolah dan nilai-nilai pesantren dalam manajemen kurikulum karakter di SMP Al-Azhar Menganti Gresik. Studi tersebut menyoroti peran strategis dua biro, yakni biro pendidikan dan biro pesantren, dalam merancang serta mengimplementasikan kurikulum yang menekankan nilai moral dan kedisiplinan siswa. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut sebagian besar berfokus pada lembaga berbasis pesantren atau belum secara komprehensif menelaah kebijakan pendidikan karakter Islam dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan publik yang mencakup aspek konten, agenda setting, formulasi, aktor, implementasi, dan evaluasi. Hingga kini, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan teori implementasi Edward III dan model evaluasi kebijakan Dunn untuk mengkaji efektivitas kebijakan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dasar berbasis Islam modern.

Kebaruan penelitian ini terletak pada dua aspek utama. Pertama, objek kajian difokuskan pada sekolah dasar Islam modern, bukan lembaga pesantren, sehingga menghadirkan konteks yang berbeda dalam penerapan nilai-nilai karakter Islami. Kedua, analisis dilakukan dalam konteks era digital, di mana pembentukan karakter siswa menghadapi tantangan yang dipengaruhi secara signifikan oleh eksposur terhadap media sosial dan teknologi digital. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan karakter perlu dirancang tidak hanya berbasis nilai-nilai agama, tetapi juga diarahkan pada penguatan literasi digital dan etika bermedia. Penelitian

ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Program *Alazka Islamic Character Building* (A-ICB) pada salah satu sekolah dasar Islam di Surabaya secara komprehensif, dengan menelaah dimensi konten kebijakan, agenda setting, formulasi, aktor pelaksana, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Analisis dilakukan dengan mengacu pada kerangka teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn, Edward III, serta Howlett dan Ramesh, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses, tantangan, dan efektivitas kebijakan A-ICB dalam konteks pendidikan karakter Islam di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis kebijakan, mengacu pada model William N. Dunn (2003) pada Gambar 1 yang mencakup enam dimensi: konten kebijakan, agenda setting, formulasi, aktor, implementasi, dan evaluasi. Teori implementasi Edward III serta konsep aktor kebijakan dari Howlett & Ramesh turut digunakan untuk memperkuat analisis.



Gambar 1. Proses Analisis Kebijakan

Berdasarkan Gambar 1, diketahui bahwa objek penelitian adalah *Program Alazka Islamic Character Building* (A-ICB) di SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Partisipan dipilih secara *purposive* karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam perumusan, implementasi, maupun evaluasi kebijakan A-ICB. Partisipan meliputi kepala sekolah, tim kurikulum dan A-ICB, guru kelas dan mata pelajaran, siswa, orang tua, serta perwakilan Yayasan Al-Azhar Kelapa Gading. Rentang waktu penelitian berlangsung selama tiga bulan, yakni dari Januari hingga Maret 2025, dengan pelaksanaan kegiatan lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan secara intensif pada periode tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap SK Kepala Sekolah, Buku Panduan A-ICB, SOP, dan dokumen pendukung lainnya. Kuesioner terbuka juga digunakan untuk memperkuat data persepsi guru dan orang tua. Prosedur penelitian meliputi observasi praktik penerapan nilai-nilai Rabbaniyah, Ilmiah, Insaniyah, dan Alamiyah dalam kegiatan sekolah, serta wawancara mendalam terhadap informan kunci. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik, serta diskusi reflektif dengan pihak sekolah. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan berdasarkan model dari Miles, Huberman, dan Saldana (Yatim, 2023) yang meliputi empat tahap yaitu pengumpulan data, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kondensasi data, dengan menyaring dan menyusun data ke dalam kategori sesuai dimensi kebijakan. Penyajian data, dalam bentuk narasi dan tabel analisis untuk memudahkan interpretasi dan penarikan serta verifikasi simpulan, untuk merumuskan temuan yang valid dan sesuai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan William N. Dunn (2003), yang mencakup enam dimensi utama dalam proses kebijakan, yaitu konten kebijakan, agenda setting, formulasi, aktor, implementasi, dan evaluasi. Selain itu, teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III serta konsep keterlibatan aktor kebijakan dari Howlett dan Ramesh turut diadopsi untuk

memberikan perspektif yang lebih menyeluruh mengenai proses, pelaku, dan dampak kebijakan *Program Alazka Islamic Character Building* (A-ICB) di salah satu SD Islam Surabaya. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, penelitian ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai kebijakan A-ICB, mulai dari perumusan hingga evaluasi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam terkait efektivitas implementasi program dalam konteks pendidikan karakter Islam di era digital.

1. Konten (Isi Kebijakan)

Kepala salah satu SD Islam di Surabaya telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 016/SDI.SKGS/VII/46.2 tentang Kebijakan *Program Alazka Islamic Character Building* (A-ICB). Kebijakan ini menetapkan bahwa manajemen kurikulum berbasis A-ICB menjadi pendekatan wajib dalam pengelolaan pembelajaran, pengembangan karakter, dan pelaksanaan kegiatan sekolah. Seluruh warga sekolah, yang meliputi guru, staf, siswa, dan orang tua, diwajibkan untuk memahami, mendukung, dan mengimplementasikan nilai-nilai utama A-ICB. Nilai-nilai tersebut mencakup Rabbaniyah (religiusitas), Ilmiah (keilmuan), Insaniyah (kemanusiaan), dan Alamiyah (kepedulian terhadap lingkungan).

Pelaksanaan program ini mengacu pada Buku Panduan Alazka-ICB yang memuat berbagai bentuk pembiasaan karakter. Di antaranya adalah penerapan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) dan 6K (Kebersihan, Kerapian, Ketertiban, Kedisiplinan, Kesehatan, Keselamatan), serta pembiasaan adab Islami seperti *birrul walidain* dan etika dalam beribadah. Selain itu, program ini juga menekankan penggunaan teknologi secara Islami serta memberikan edukasi khusus mengenai kesehatan mental, anti-perundungan, anti-radikalisme, dan isu-isu penting lainnya. Strategi implementasi A-ICB dilakukan melalui proses sosialisasi kepada seluruh pihak terkait, pembiasaan nilai-nilai A-ICB dalam aktivitas harian dan ekstrakurikuler, serta penguatan materi melalui jam khusus dan tema bulanan. Evaluasi dilakukan secara rutin melalui observasi, survei, dan masukan dari orang tua untuk memastikan ketercapaian tujuan karakter building. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dengan menggunakan berbagai instrumen seperti laporan kegiatan dan lembar komitmen. Segala bentuk kendala, perubahan, atau tambahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan ini akan ditindaklanjuti melalui keputusan kepala sekolah atau surat edaran resmi.

Secara substantif, kebijakan ini mengadopsi prinsip pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam, yang dirumuskan dalam empat pilar utama: Rabbaniyah (religiusitas), Ilmiah (keilmuan), Insaniyah (kemanusiaan), dan Alamiyah (kepedulian terhadap lingkungan). Pendekatan ini sejalan dengan temuan Rahmawati (2022) yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai religius secara eksplisit dalam kurikulum mampu membentuk dimensi spiritual dan moral siswa secara signifikan. Selain itu, nilai-nilai tersebut memiliki kesesuaian dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka, khususnya aspek beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia (Purnawanto., 2022). Menurut M Hazin et al (2024) di dalam Implementasi Kurikulum Merdeka ini pembelajaran diarahkan untuk mempersiapkan siswa agar memiliki akhlak spiritual, berbudi pekerti luhur, dan memiliki pemahaman akan dasar-dasar agama, mandiri, kreatif, bernalar kritis serta cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

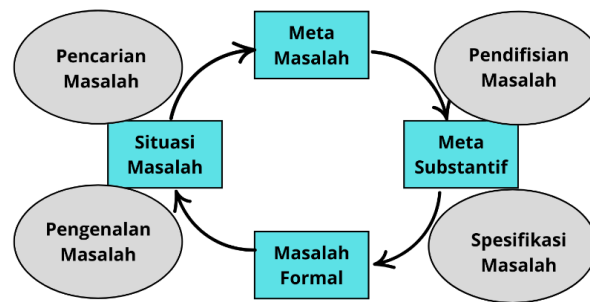
Penanaman budaya 5S dan pembiasaan 6K menjadi bagian integral dari implementasi nilai A-ICB dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Strategi ini terbukti efektif dalam membangun budaya positif di sekolah, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian oleh Husaini (2021), yang menyoroti bahwa keberhasilan pendidikan karakter sangat dipengaruhi oleh rutinitas dan keteladanan yang dikondisikan secara konsisten. Selain itu, integrasi nilai-nilai adab Islami seperti *Birrul Walidain*, serta pendekatan edukatif terhadap isu-isu kontemporer seperti kesehatan mental, anti-perundungan, dan anti-radikalisme, mencerminkan kebijakan yang adaptif terhadap tantangan zaman. Hal ini memperkuat temuan Hasanah (2021) mengenai urgensi pendidikan karakter yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga kontekstual dan relevan dengan realitas sosial siswa.

2. Agenda Setting (Konteks Kebijakan)

a. Teori Agenda Setting Menurut W. Dunn

Agenda setting merupakan proses perumusan masalah hingga menjadi fokus perhatian para pembuat kebijakan. William N. Dunn (2003) menjelaskan bahwa tahapan agenda setting mencakup empat langkah utama, yaitu pencarian masalah (*problem search*), pendefinisian masalah (*problem definition*), spesifikasi masalah (*problem specification*), dan pengenalan masalah (*problem sensing*). Keempat

tahapan ini menggambarkan alur logis bagaimana suatu isu diidentifikasi, dianalisis, dan diprioritaskan sehingga dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Proses Agenda Setting William Dunn (2003)

Berdasarkan Gambar 2, diketahui bahwa dalam proses analisis kebijakan, tahapan pertama yang dilakukan adalah pengenalan masalah (*problem sensing*). Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan publik yang muncul dalam realitas sosial. Melalui pengamatan dan pemahaman terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat, analisis kebijakan mulai menyadari adanya masalah-masalah yang perlu direspons oleh kebijakan publik. Pengenalan ini menjadi langkah awal yang penting agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan nyata. Setelah masalah dikenali secara umum, proses berlanjut ke tahap pencarian masalah (*problem search*). Pada tahap ini, dilakukan pengkajian lebih dalam terhadap situasi masalah yang ada, dengan melibatkan berbagai perspektif dari para pemangku kepentingan. Tujuannya bukan hanya untuk menemukan satu sumber masalah utama, tetapi untuk mendapatkan representasi yang komprehensif dari berbagai sudut pandang. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil nantinya tidak bersifat parsial, melainkan mampu menjangkau kompleksitas masalah.

Selanjutnya, dilakukan pendefinisian masalah, yaitu proses merumuskan dan memaknai masalah tersebut secara konseptual dengan menggunakan istilah-istilah yang mendasar dan mudah dipahami secara luas. Pendefinisian ini membantu memberikan kejelasan terhadap esensi permasalahan yang sedang dihadapi dan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan yang tepat. Tahapan akhir dari proses awal analisis kebijakan ini adalah spesifikasi masalah. Setelah masalah substantif dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengubahnya menjadi masalah formal yang lebih terukur dan spesifik. Proses ini penting agar masalah yang telah didefinisikan dapat dijadikan dasar yang jelas dalam penyusunan alternatif kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih terarah.

b. Penerapan Agenda Setting pada Kebijakan Program A-ICB Menurut William Dunn

Agenda setting merupakan tahap awal yang sangat menentukan dalam siklus kebijakan publik. Menurut William N. Dunn (2003), agenda setting adalah proses bagaimana suatu masalah diidentifikasi, didefinisikan, dan diprioritaskan sehingga masuk ke dalam perhatian pembuat kebijakan. Penerapan agenda setting kebijakan diperlihatkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penerapan Agenda Setting pada Kebijakan Program A-ICB (Dunn, 2003)

Tahap	Penjelasan	Kegiatan Utama	Tujuan	Aplikasi pada Kebijakan A-ICB
Situasi Masalah	Gejala awal munculnya permasalahan yang belum jelas bentuk dan dampaknya.	Pencarian Masalah, Pengenalan Masalah	Mengidentifikasi masalah potensial yang perlu ditangani.	Terdeteksi fenomena siswa kurang kuat dalam karakter Islami di era teknologi digital (pengaruh gadget, media sosial).
Meta Masalah	Masalah masih dalam bentuk mentah, belum didefinisikan secara jelas dan terukur.	Penyaringan dan Prioritasi Masalah	Menentukan masalah mana yang layak untuk diformalkan.	Banyak masalah karakter muncul, tetapi diprioritaskan pada masalah kurangnya integrasi nilai Islam dalam kurikulum.

Tahap	Penjelasan	Kegiatan Utama	Tujuan	Aplikasi pada Kebijakan A-ICB
Masalah Substantif	Masalah yang telah didefinisikan dan dispesifikasikan dengan jelas (siapa, apa, bagaimana).	Pendefinisian Masalah, Spesifikasi Masalah	Menyusun masalah secara operasional untuk ditindaklanjuti.	Definisi: <i>Kurikulum sekolah belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai Rabbaniyah, Ilmiah, Insaniyah, dan Alamiyah.</i>
Masalah Formal	Masalah yang sudah dirumuskan dan dimasukkan dalam agenda kebijakan resmi.	Legalisasi dan Formalisasi Masalah	Mempersiapkan kebijakan/program resmi untuk penyelesaian.	SK Kepala Sekolah, Buku Panduan A-ICB, SOP Implementasi A-ICB diterbitkan untuk merespons masalah tersebut.

Berdasarkan Tabel 1, dalam konteks kebijakan *Program Alazka Islamic Character Building* (A-ICB), agenda setting diawali dengan pengenalan masalah yang muncul dari realitas sosial di lingkungan sekolah khususnya melemahnya karakter Islami siswa akibat pengaruh digitalisasi, media sosial, dan pergeseran nilai dalam masyarakat urban. Hal ini selaras dengan temuan Hasanah (2021) yang menegaskan bahwa tantangan utama dalam pendidikan karakter di era digital adalah eksposur anak terhadap konten negatif yang sulit dikontrol oleh lembaga pendidikan formal. Kondisi tersebut mengakibatkan kesenjangan antara nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dengan perilaku keseharian siswa, terutama dalam hal adab, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial.

Melalui proses *problem sensing* dan *problem definition*, pihak sekolah mulai merumuskan bahwa gejala menurunnya praktik karakter Islami bukan hanya akibat lemahnya pengawasan, tetapi juga belum terintegrasinya nilai-nilai Islam secara sistematis dalam manajemen kurikulum sekolah. Hal ini sejalan dengan model tahapan agenda setting menurut Dunn yang meliputi problem search, problem definition, problem specification, dan problem sensing (Dunn, 2003). Masalah ini kemudian diposisikan sebagai meta masalah, yaitu permasalahan besar yang memayungi berbagai isu turunan seperti kurangnya pembiasaan nilai adab, lemahnya budaya sekolah, serta terbatasnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan karakter. Berangkat dari realitas tersebut, sekolah menetapkan perlunya kebijakan khusus yang mampu menstrukturkan nilai-nilai karakter keislaman secara terukur, terencana, dan terpantau dalam satu sistem kurikulum. Keputusan untuk menjadikan A-ICB sebagai agenda kebijakan utama selaras dengan prinsip prioritization dalam agenda setting, yaitu memutuskan masalah mana yang harus segera ditangani dan layak diformalkan dalam kebijakan. Sebagaimana ditegaskan oleh Fauzi dan Fika (2023), kebijakan pendidikan karakter yang berhasil harus diawali dengan kesadaran institusi untuk memetakan masalah secara mendalam dan merumuskan arah kebijakan sebagai respons sistemik.

Selain itu, agenda setting dalam kebijakan A-ICB tidak hanya didorong oleh kebutuhan internal sekolah, tetapi juga oleh tekanan eksternal berupa tuntutan kebijakan nasional melalui Kurikulum Merdeka, yang menempatkan profil pelajar Pancasila sebagai kerangka dasar pembentukan karakter. Nilai-nilai seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, dan bernalar kritis dalam profil tersebut sangat beririsan dengan prinsip-prinsip A-ICB, menunjukkan adanya sinergi antara arah kebijakan makro (nasional) dan mikro (sekolah). Hal ini diperkuat oleh sebuah penelitian yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan yang mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks lokal cenderung lebih berhasil dalam implementasi program karakter (Purnawanto 2022). Dengan demikian, agenda setting kebijakan A-ICB merupakan hasil dari kombinasi antara kesadaran internal terhadap kondisi siswa dan lingkungan sekolah, serta dorongan eksternal dari perkembangan sosial dan kebijakan pendidikan nasional. Hal ini menjadikan A-ICB bukan hanya sebagai program pelengkap, melainkan sebagai agenda strategis utama yang menjadi pijakan bagi reformasi karakter di lingkungan salah satu SD Islam Surabaya.

3. Formulasi Kebijakan

a. Teori Formulasi Kebijakan Menurut William Dunn

Masalah yang sudah masuk dalam agenda setting atau konteks kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan formulasi kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan

yang diambil untuk memecahkan masalah. Menurut William Dunn, formulasi kebijakan (*policy formulation*) adalah proses di mana masalah-masalah kebijakan diidentifikasi, agenda kebijakan ditetapkan, alternatif kebijakan dievaluasi, dan kebijakan terpilih ditetapkan.

b. Proses Formulasi Kebijakan Program A-ICB

Proses penyusunan kebijakan *Program Alazka Islamic Character Building* diperlihatkan secara terperinci pada Tabel 2 dengan tahapan formulasi menurut William Dunn (2003).

Tabel 2. Proses Formulasi Kebijakan Program A-ICB

Tahapan Formulasi	Penjelasan Umum	Aplikasi pada Kebijakan A-ICB
Identifikasi Masalah	Menggali dan memahami masalah publik yang memerlukan intervensi kebijakan.	Adanya tantangan bahwa siswa kurang memiliki karakter Islami yang kuat dalam keseharian akibat pengaruh teknologi dan budaya global.
Penetapan Agenda	Memasukkan masalah tersebut ke dalam prioritas kebijakan.	Sekolah (melalui kepala sekolah dan yayasan) menetapkan bahwa penguatan nilai karakter Islami harus menjadi agenda utama sekolah.
Evaluasi Alternatif	Menyusun dan membandingkan berbagai opsi pemecahan masalah.	(a) Menyisipkan pendidikan karakter dalam mata pelajaran umum, atau (b) Merancang kurikulum dan sistem pembiasaan khusus berbasis ICB. Alternatif (b) dinilai lebih sistemik dan berkelanjutan.
Penetapan Kebijakan	Memilih dan menetapkan kebijakan yang paling tepat, disertai dokumen resmi dan panduan implementasi.	Menetapkan kebijakan Program A-ICB melalui SK Kepala Sekolah, Buku Panduan A-ICB, dan SOP implementasi.

Berdasarkan Tabel 2, proses penyusunan kebijakan *Program Alazka Islamic Character Building* merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai langkah yang terstruktur. Formulasi kebijakan merupakan tahapan strategis dalam proses penyusunan kebijakan publik, yang bertujuan untuk menentukan solusi terbaik dari masalah yang telah teridentifikasi dan diprioritaskan. William N. Dunn (2003) menyatakan bahwa formulasi kebijakan mencakup empat proses utama, yaitu identifikasi masalah, penetapan agenda, evaluasi alternatif solusi, dan penetapan kebijakan akhir. Dalam konteks kebijakan *Alazka Islamic Character Building* (A-ICB) di salah satu SD Islam Surabaya, keempat proses tersebut dijalankan secara sistematis dan kontekstual.

Tahap pertama adalah identifikasi masalah, di mana pihak sekolah menyadari adanya tantangan serius terkait menurunnya internalisasi karakter Islami siswa, yang disebabkan oleh pengaruh kuat dari media digital, budaya populer, dan minimnya sistem pembiasaan yang konsisten di lingkungan sekolah dan rumah. Fenomena ini bukan sekadar isu perilaku, tetapi telah menjadi persoalan struktural dalam manajemen pendidikan dasar. Hal ini sejalan dengan temuan Hasanah (2021), yang menyoroti bahwa penetrasi teknologi dalam kehidupan anak berdampak langsung terhadap menurunnya interaksi sosial, sikap spiritual, dan kesadaran moral mereka. Tahap kedua, dalam penetapan agenda, pihak sekolah bersama yayasan menetapkan isu lemahnya karakter Islami sebagai fokus utama yang harus segera ditangani. Agenda ini kemudian dimasukkan ke dalam perencanaan strategis sekolah, dengan penguatan nilai keislaman sebagai salah satu indikator keberhasilan pendidikan. Penetapan agenda ini mencerminkan pentingnya *political will* dan kepemimpinan strategis dalam menjadikan isu karakter sebagai prioritas, seperti yang ditegaskan dalam penelitian oleh Fauzi dan Fika (2023), bahwa keberhasilan reformasi kebijakan karakter sangat bergantung pada komitmen pimpinan sekolah dan dukungan struktur organisasi. Tahap ketiga adalah evaluasi alternatif, yaitu proses membandingkan berbagai opsi solusi terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Dalam hal ini, sekolah mempertimbangkan dua pendekatan utama: (a) menyisipkan materi pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran umum, atau (b) merancang kurikulum dan sistem pembiasaan karakter Islami secara khusus dan terstruktur melalui A-ICB. Alternatif kedua dipilih karena dinilai lebih sistemik, berkelanjutan, dan mampu menciptakan budaya sekolah Islami yang utuh. Pemilihan ini selaras dengan studi oleh Rahmawati (2022), yang menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan karakter di sekolah Islam lebih efektif jika dilakukan melalui kurikulum integratif dan praktik pembiasaan yang konsisten.

Pada tahap penetapan kebijakan, sekolah memformalkan Program A-ICB sebagai kebijakan resmi melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah, disertai Buku Panduan A-ICB, Standar Operasional Prosedur (SOP) implementasi, serta instrumen evaluasi dan monitoring. Penetapan ini mencerminkan pemenuhan prinsip policy legitimacy, yaitu kebijakan memiliki landasan hukum dan prosedural yang jelas, sebagaimana ditegaskan oleh Howlett dan Ramesh (2003). Dokumen kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan teknis, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai inti lembaga pendidikan yang ingin diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dengan demikian, formulasi kebijakan A-ICB menunjukkan adanya proses yang terencana, partisipatif, dan berbasis pada kebutuhan riil satuan pendidikan. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan karakter Islami tidak semata ditentukan oleh isi kurikulum, tetapi juga oleh ketepatan analisis masalah dan perencanaan alternatif yang matang.

4. Aktor Kebijakan

a. Teori Aktor Kebijakan Menurut Howlett dan Ramesh

Perumusan kebijakan melibatkan berbagai aktor yang memegang peranan penting dalam setiap tahapan proses pembuatan kebijakan. Menurut Howlett dan Ramesh, aktor kebijakan adalah semua individu atau kelompok yang terlibat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik, baik sebagai perumus kebijakan maupun kelompok penekan yang aktif berinteraksi. Aktor kebijakan dapat dibedakan menjadi aktor internal dan eksternal, dengan masing-masing memiliki perhatian dan kepentingan yang berbeda terhadap kebijakan.

b. Aktor Kebijakan yang Terlibat

Pada Tabel 3 memperlihatkan semua individu atau kelompok yang terlibat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan program A-ICB baik aktor internal maupun eksternal. Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa kebijakan Program *Alazka Islamic Character Building* (A-ICB), aktor internal terdiri dari Kepala Sekolah, Tim Kurikulum, Koordinator A-ICB, guru kelas, serta guru mata pelajaran. Kepala sekolah berperan sebagai pembuat keputusan utama, penerbit kebijakan melalui Surat Keputusan, dan pengarah strategis implementasi A-ICB. Sebagaimana ditegaskan oleh Fauzi dan Fika (2023), kepemimpinan kepala sekolah yang visioner dan transformatif menjadi kunci dalam menanamkan budaya karakter Islami secara menyeluruh di lingkungan sekolah. Tim Kurikulum dan Koordinator A-ICB memiliki peran teknis dan operasional yang sangat penting, yaitu merancang materi pembiasaan, menyusun panduan teknis, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Para guru kelas dan guru mata pelajaran berfungsi sebagai pelaksana utama pembiasaan nilai-nilai Rabbaniyah, Ilmiah, Insaniyah, dan Alamiyah dalam kegiatan pembelajaran. Penelitian oleh Rahmawati (2022) menegaskan bahwa guru yang memahami substansi nilai karakter dan mampu mengintegrasikannya dalam kegiatan belajar mengajar akan menghasilkan perubahan perilaku siswa secara signifikan.

Tabel 3. Aktor Kebijakan yang Terlibat

Jenis Aktor	Nama Aktor	Peran/Intervensi dalam Kebijakan A-ICB	Kepentingan
Aktor Internal	Kepala Sekolah	Penentu kebijakan, penerbit SK, pengarah implementasi A-ICB.	Memastikan visi-misi sekolah Islami tercapai dan berjalan sistematis.
	Guru & Wali Kelas	Pelaksana teknis pembiasaan, integrasi ICB dalam RPP, evaluasi nilai karakter siswa.	Mendukung pencapaian karakter Islami siswa dalam proses belajar mengajar.
	Tim Kurikulum / Tim Implementasi A-ICB	Penyusun program, monitoring pelaksanaan A-ICB, fasilitator pelatihan dan sosialisasi.	Keberhasilan teknis dan administratif implementasi ICB di sekolah.
	Yayasan Al-Azhar Kelapa Gading	Penyusun kebijakan makro, pemberi arahan strategis dan dukungan sumber daya (SDM dan materi).	Konsistensi nilai Alazka di seluruh unit, pencitraan dan mutu lembaga.

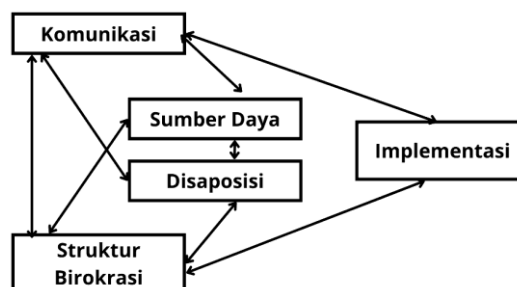
Jenis Aktor	Nama Aktor	Peran/Intervensi dalam Kebijakan A-ICB	Kepentingan
Aktor Eksternal	Orang Tua/Wali Murid	- Melanjutkan pembiasaan karakter di rumah- Memberi dukungan dan feedback terhadap program sekolah	Terbentuknya sinergi nilai karakter Islami antara rumah dan sekolah
	Siswa	- Pelaku utama pembiasaan nilai A-ICB- Menerapkan akhlak Islami dalam kegiatan sehari-hari	Terwujudnya siswa yang berakhlak mulia dan memiliki kepribadian Islami
	Komite Sekolah / Perwakilan Wali	- Menyampaikan aspirasi orang tua- Memberi pertimbangan terhadap kebijakan sekolah	Transparansi dan keterlibatan dalam pengambilan kebijakan pendidikan karakter
	Tokoh Agama / Narasumber Eksternal	- Memberikan pelatihan, tausiyah, dan validasi nilai-nilai karakter Islami	Relevansi nilai A-ICB dengan ajaran Islam dan realitas sosial Masyarakat
	Masyarakat Sekitar Sekolah	- Menjadi lingkungan sosial siswa dalam menerapkan pembiasaan karakter di luar sekolah	Lingkungan eksternal yang mendukung atau menguji pembentukan karakter Islami siswa

Aktor eksternal dalam kebijakan A-ICB meliputi siswa, orang tua, komite sekolah, tokoh agama, dan masyarakat sekitar. Siswa merupakan subjek utama sekaligus penerima manfaat kebijakan, yang diharapkan mampu menampilkan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua memegang peranan penting dalam memperkuat pembiasaan karakter di rumah dan menjadi mitra sekolah dalam membangun sinergi pendidikan karakter. Studi oleh Gifarri dan Rahmat (2024) menemukan bahwa keterlibatan aktif orang tua dalam kebijakan pendidikan karakter dapat meningkatkan keberhasilan pembentukan karakter anak secara berkelanjutan dan menunjukkan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi salah satu indikator keberhasilan pendidikan karakter berbasis komunitas.

5. Implementasi Kebijakan

a. Teori Implementasi Kebijakan Menurut Edward III

Edward III menyatakan implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik yang berada di antara tahap perumusan kebijakan dan hasil yang ditimbulkannya baik berupa output maupun outcome (Yanti, 2023). Edwards III juga mengemukakan bahwa terdapat empat faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap atau komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi. Keempat elemen tersebut saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan yang ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Model Implementasi kebijakan Publik Edward III

Berdasarkan Gambar 3, diketahui bahwa komunikasi memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Dalam konteks ini, terdapat tiga indikator utama yang menjadi tolok ukur efektivitas komunikasi, yaitu kejelasan pesan dan konsistensi penyampaian. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, yang mencakup tenaga pelaksana, informasi, kewenangan, serta fasilitas pendukung (Anggara, 2014). Sementara itu, disposisi merujuk pada sikap dan tingkat komitmen pelaksana kebijakan. Setiap kebijakan memerlukan individu yang memiliki motivasi tinggi dan tekad

kuat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Adapun struktur birokrasi mengacu pada sistem kerja yang disusun untuk mengatur pelaksanaan kebijakan. Edwards menekankan pentingnya keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur alur kerja antar pelaksana, terutama dalam situasi ketika implementasi kebijakan melibatkan lebih dari satu lembaga atau instansi.

b. Analisis Implementasi Kebijakan Program A-ICB

Berikut adalah analisis implementasi kebijakan Program A-ICB di SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya menggunakan teori Edward III. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor utama yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi atau sikap pelaksana (disposition), struktur birokrasi (bureaucratic structure) yang ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Analisis Implementasi Kebijakan Program A-ICB

Aspek	Analisis dalam Konteks A-ICB	Tingkat Pengaruh
Komunikasi	- Sosialisasi A-ICB sudah dilakukan melalui pertemuan guru, rapat orang tua, dan pelatihan internal.- Buku Panduan A-ICB disediakan sebagai dokumen resmi.- Namun, masih ada kesenjangan pemahaman antara guru dan tenaga pendukung, serta antara sekolah dan orang tua.	Tinggi, namun butuh peningkatan dalam konsistensi penyampaian dan umpan balik.
Sumber Daya	- Guru telah dilatih dan diberi pedoman teknis.- Tersedia Buku Panduan, SOP, dan alat evaluasi karakter.- Sarana pembiasaan (spanduk, jadwal ICB, reward) tersedia.- Namun, tenaga kependidikan non-guru kadang belum dilibatkan maksimal.	Cukup, namun perlu pemerataan pelibatan semua elemen sekolah.
Disposisi (Sikap Pelaksana)	- Sebagian besar guru memiliki sikap positif, karena selaras dengan nilai-nilai Islam yang dianut sekolah.- Namun, ada variasi komitmen antar guru dalam penerapan sehari-hari.- Kepala sekolah dan tim ICB menunjukkan teladan kuat.	Tinggi, tetapi perlu penguatan komitmen kolektif dan konsistensi antar individu pelaksana.
Struktur Birokrasi	- Struktur pelaksanaan jelas: kepala sekolah → koordinator ICB → wali kelas & guru mapel.- SOP sudah tersedia namun belum semua sekolah atau unit menjalankan siklus monev secara teratur.- Kadang masih tumpang tindih antara kegiatan ICB dengan kegiatan non-ICB yang berjalan bersamaan.	Cukup baik, namun perlu penguatan sistem koordinasi dan integrasi jadwal.

Berdasarkan Tabel 4, pelaksanaan program *Alazka Islamic Character Building* (A-ICB) di salah satu SD Islam Surabaya menunjukkan landasan yang cukup kuat dalam beberapa dimensi pelaksanaan kebijakan menurut Edward III. Komunikasi telah dilakukan melalui pertemuan guru, forum orang tua, dan pelatihan internal, didukung adanya buku panduan resmi A-ICB. Namun, masih terdapat kesenjangan pemahaman antara guru, staf pendukung, dan orang tua, sehingga diperlukan komunikasi yang lebih konsisten dan dua arah. Dari segi sumber daya, sekolah telah menyediakan pelatihan, panduan, dan sarana fisik seperti spanduk dan sistem penghargaan, namun keterlibatan staf non-pengajar masih kurang merata. Faktor disposisional menunjukkan komitmen tinggi dari pimpinan dan tim ICB, meskipun konsistensi guru perlu ditingkatkan. Secara struktural, kebijakan memiliki hierarki organisasi dan SOP yang jelas, tetapi monitoring dan evaluasi rutin serta integrasi dengan kegiatan lain masih menjadi tantangan. Secara keseluruhan, meskipun pengaruh tiap dimensi cukup besar, perbaikan koordinasi, inklusivitas, dan konsistensi pelaksanaan perlu terus dilakukan agar program A-ICB dapat berjalan berkelanjutan dan efektif.

6. Evaluasi Kebijakan

a. Teori Evaluasi Kebijakan Menurut William Dunn

William Dunn mengatakan istilah evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan suatu penafsiran, penilaian dan pemberian angka (Sudiro, 2018). Dalam hal ini evaluasi mengenai nilai dan manfaat suatu hasil kebijakan, artinya dalam evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kinerja suatu kebijakan. Lebih jelas Dunn mengatakan bahwa evaluasi memberikan sumbangan pemikiran terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pada umumnya sebuah nilai dapat dikritik dengan menanyakan secara mendalam sebuah kesiapan tujuan dan target.

William N. Dunn mengemukakan bahwa terdapat enam kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan atau alternatif mampu menghasilkan dampak atau hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Aspek ini erat kaitannya dengan rasionalitas teknis dan biasanya diukur berdasarkan output berupa produk, layanan, atau nilai ekonomis yang dihasilkan (Dunn, 2003). Sementara itu, efisiensi merujuk pada seberapa besar upaya atau sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Suatu kebijakan dianggap efisien apabila mampu mencapai hasil maksimal dengan penggunaan biaya atau usaha seminimal mungkin (Dunn, 2003). William N. Dunn mengatakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003). William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003).

Kebijakan yang berorientasi pada asas pemerataan adalah kebijakan yang dampak dan manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok sasaran. Sebuah program mungkin saja dinilai efektif, efisien, dan memadai, namun belum tentu adil apabila distribusi manfaatnya tidak merata. Sementara itu, menurut William N. Dunn, responsivitas mencerminkan sejauh mana kebijakan mampu merespons kebutuhan, keinginan, atau nilai-nilai yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003). Adapun ketepatan mengacu pada kesesuaian antara tujuan program dengan nilai-nilai yang ingin dicapai serta kekuatan asumsi yang mendasari tujuan tersebut. Dunn juga menambahkan bahwa kelayakan menjadi indikator penting dalam menyeleksi alternatif kebijakan, dengan mempertimbangkan apakah hasil yang ditawarkan oleh suatu alternatif benar-benar mencerminkan tujuan yang layak dan rasional untuk direkomendasikan.

b. Analisis Evaluasi Kebijakan Program A-ICB

Berikut pada Tabel 5 adalah analisis evaluasi kebijakan Program A-ICB di salah satu SD Islam Surabaya, berdasarkan 6 kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Analisis Evaluasi Kebijakan Program A-ICB

Kriteria Evaluasi	Penjelasan Umum	Evaluasi Program A-ICB	Catatan / Rekomendasi
Efektivitas	Sejauh mana tujuan kebijakan tercapai	Sebagian besar guru sudah menerapkan budaya 5S, 6K, dan pembiasaan adab Islami di kelas. Siswa menunjukkan peningkatan perilaku Islami dalam keseharian.	Perlu data kuantitatif (observasi, survey) untuk mengukur tingkat perubahan karakter.
Efisiensi	Perbandingan antara hasil yang dicapai dan sumber daya yang digunakan	Penggunaan sumber daya seperti waktu guru, jadwal sekolah, dan materi panduan relatif sebanding dengan dampak perubahan budaya siswa.	Tingkat efisiensi cukup baik, tetapi perlu minimalisasi duplikasi kegiatan yang serupa.
Kecukupan	Apakah kebijakan sudah cukup menjawab seluruh aspek masalah	A-ICB sudah mencakup nilai Rabbaniyah, Ilmiah, Insaniyah, Alamiyah, serta isu-isu penting seperti bullying, mental health, dll.	Sudah cukup menyeluruh, namun perlu perluasan pada aspek evaluasi hasil yang lebih objektif.
Pemerataan	Apakah manfaat kebijakan dirasakan secara merata oleh seluruh sasaran	Belum terlalu merata. Siswa dengan dukungan orang tua yang kuat lebih cepat berkembang karakternya dibanding siswa dengan latar belakang keluarga kurang aktif.	Diperlukan pendekatan diferensiasi dan pelibatan aktif bagi orang tua yang pasif.
Responsivitas	Sejauh mana kebijakan menanggapi kebutuhan masyarakat (stakeholder)	Orang tua merasa program A-ICB menjawab kebutuhan pendidikan karakter, dan guru juga merasa program ini selaras dengan nilai dasar Alazka.	Teruskan forum komunikasi orang tua-sekolah, misalnya dalam bentuk kelas parenting atau sesi refleksi.

Kriteria Evaluasi	Penjelasan Umum	Evaluasi Program A-ICB	Catatan / Rekomendasi
Ketepatan	Sejauh mana kebijakan sesuai dengan masalah yang dihadapi	Sangat tepat: karakter Islami memang menjadi kebutuhan penting di era digitalisasi, dan A-ICB menjawab itu dengan pendekatan struktural.	Perlu ditingkatkan ketepatan pelaksanaan teknis agar tidak hanya seremonial atau simbolis.

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan *Alazka Islamic Character Building* (A-ICB) di salah satu SD Islam Surabaya dirancang sebagai respon terhadap tantangan lemahnya karakter Islami peserta didik di era digital. Kebijakan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi diwujudkan dalam bentuk dokumen formal (SK Kepala Sekolah), buku panduan, sistem pembiasaan, dan evaluasi terstruktur yang menasar penguatan nilai Rabbaniyah, Ilmiah, Insaniyah, dan Alamiyah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Mohamad Arief dan Dan Rusman (2022), yang menyatakan bahwa keberhasilan manajemen kurikulum berbasis karakter sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan, struktur pelaksanaan yang jelas, dan keterlibatan seluruh komponen sekolah. Subekti Kusumadewi (2019) juga mengemukakan bahwa model manajemen kurikulum karakter yang berbasis nilai religius mampu meningkatkan kualitas interaksi sosial dan moral siswa, khususnya jika dirancang menyatu dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Namun, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan pemahaman antar pelaksana kebijakan, yang juga ditekankan oleh Nurbaiti (2020), bahwa implementasi pendidikan karakter sering kali terhambat oleh variasi persepsi di kalangan guru dan rendahnya pelatihan berkelanjutan. Dalam konteks ini, A-ICB menunjukkan pendekatan yang relatif lebih sistematis karena menyediakan SOP, buku panduan, dan evaluasi berbasis observasi serta umpan balik orang tua, sebagaimana disarankan oleh Maulida (2020). Secara internasional, hasil ini didukung oleh kajian Lickona (1991) yang menekankan bahwa pembentukan karakter harus didasarkan pada integrasi tiga aspek: *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* ketiganya tercermin dalam nilai-nilai A-ICB. Penelitian Davison et al. (2019) di New Zealand juga menunjukkan bahwa karakter siswa dapat dibentuk secara efektif bila nilai-nilai inti dimasukkan ke dalam sistem sekolah secara menyeluruh dan melibatkan orang tua serta komunitas.

Penelitian ini juga memperkuat temuan Hasanah (2021) bahwa digitalisasi berdampak pada pola pikir dan perilaku siswa, dan solusi karakter berbasis nilai Islam sangat dibutuhkan agar siswa tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki moralitas dalam menggunakannya. Hal ini didukung ada penelitian Sahin & Yilmaz (2020) yang menyoroti bahwa pendidikan karakter dalam konteks digital harus adaptif dan berbasis budaya lokal. Dari sisi partisipasi aktor, temuan ini konsisten dengan penelitian Fauzi dan Fika (2023) yang menekankan pentingnya keterlibatan kepala sekolah, guru, orang tua, dan komite sekolah dalam perumusan dan evaluasi kebijakan pendidikan karakter. Hal serupa juga ditemukan oleh Safitri et al. (2021), yang menunjukkan bahwa pendidikan karakter lebih berhasil jika didukung oleh kolaborasi aktif antara sekolah dan orang tua.

Evaluasi dalam A-ICB menunjukkan bahwa program cukup efektif, namun aspek pemerataan dan pengukuran hasil masih perlu diperkuat. Ini sejalan dengan pandangan Dunn (2003) bahwa efektivitas dan efisiensi kebijakan harus diimbangi dengan pemerataan manfaat dan ketepatan evaluasi. Pendekatan ini juga selaras dengan model evaluasi karakter berbasis portofolio dan observasi seperti yang diterapkan dalam studi internasional oleh Berkowitz & Bier (2005). Secara umum, kebijakan A-ICB memperlihatkan bahwa model pendidikan karakter berbasis nilai Islam dapat dirancang secara sistemik di sekolah dasar, dan tidak harus berada di lingkungan pesantren. Ini merupakan kontribusi baru terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada lembaga keagamaan atau sekolah menengah (Mujiburrohman & Sulastini, 2021). Penelitian ini terbatas pada satu sekolah dasar Islam dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga belum mampu mengukur secara kuantitatif dampak A-ICB terhadap perubahan karakter siswa. Selain itu, keterlibatan orang tua dan siswa belum dieksplorasi secara mendalam dalam konteks implementasi di luar sekolah. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan mixed methods dan cakupan sekolah yang lebih luas untuk memperkuat generalisasi dan validitas hasil. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya model kebijakan pendidikan karakter Islami yang terintegrasi dan kontekstual di era digital. Program A-ICB dapat menjadi rujukan bagi sekolah Islam lainnya serta mendukung implementasi nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila dengan perspektif keislaman yang relevan dan aplikatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa *A-ICB* telah memiliki dasar kelembagaan yang kuat dan berhasil menciptakan ekosistem pendidikan berbasis nilai-nilai Islami, meskipun masih menghadapi tantangan dalam pemahaman implementator, keterlibatan orang tua, dan sistem evaluasi karakter. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pendidikan karakter Islami dapat dikembangkan secara kontekstual dan berorientasi jangka panjang melalui pendekatan kebijakan yang menyeluruh, kolaboratif, dan berkelanjutan. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan studi-studi sejenis pada jenjang dan konteks sekolah yang berbeda, serta mendorong pengembangan kebijakan pendidikan karakter yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan zaman, tetapi juga mampu membentuk peserta didik yang memiliki integritas moral, kecerdasan spiritual, dan tanggung jawab sosial. Lebih lanjut, penelitian ini membuka peluang untuk mengkaji keterkaitan antara kebijakan pendidikan karakter Islami dengan capaian akademik dan sosial siswa melalui pendekatan evaluatif yang lebih komprehensif dan berorientasi pada dampak jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya beserta seluruh guru, tim kurikulum, dan koordinator program *A-ICB* yang telah memberikan akses, informasi, dan dukungan selama proses pengumpulan data dan observasi lapangan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Yayasan Al-Azhar Kelapa Gading atas izin serta kontribusi dalam menyediakan dokumen kebijakan dan panduan program. Penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada para orang tua dan siswa yang turut berpartisipasi dalam penelitian ini.

KONTRIBUSI PENULIS

Zuanita Shofia Ade Kurnia: Conceptualization, Methodology, Validation, Resources, dan Writing - Original Draft; **Erny Roesminingsih:** Supervision, Data Curation, Writing - Review & Editing; **Murtadlo:** Supervision dan Writing - Review & Editing, **Mufarrihul Hazin:** Supervision, Data Curation, Writing - Review & Editing, serta **Amrozi Khamidi:** Supervision. Semua penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir dari naskah ini.

PERNYATAAN BEBAS KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan finansial maupun hubungan pribadi yang dapat mempengaruhi hasil yang dilaporkan dalam naskah ini.

PERNYATAAN ETIKA PENELITIAN DAN PUBLIKASI

Para penulis menyatakan bahwa penelitian dan penulisan naskah ini telah mematuhi standar etika penelitian dan publikasi, sesuai dengan prinsip ilmiah, serta bebas dari plagiasi.

PERNYATAAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI ASISTIF

Para penulis menyatakan bahwa Kecerdasan Buatan Generatif (*Generative Artificial Intelligence*) dan teknologi asistif lainnya tidak digunakan secara berlebihan dalam proses penelitian dan penulisan naskah ini. Secara khusus, ChatGPT digunakan untuk brainstorming ide. Para penulis telah meninjau dan menyunting semua konten yang dihasilkan AI guna memastikan ketepatan, kelengkapan, serta kepatuhan terhadap standar etika dan ilmiah, dan bertanggung jawab penuh atas naskah versi akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghifari, M.A., & Rahmat, R. (2024). Penguatan Pendidikan karakter melalui kolaborasi tripusat pendidikan. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 7(3), 270-276. DOI: <https://doi.org/10.31764/pendekar.v7i3.24383>.
- Amelia, L., Nurfatimah, S.A., Hasna, S., & Prihantini, P. (2022). Implementasi manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis konsep pendidikan karakter. *ELSE (Elementary School Education Journal): Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 6(2), 277-299. DOI: <https://doi.org/10.30651/else.v6i2.11207>.
- Anderson, J.E. (2014). *Public policymaking* (8th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Ariyanti, Y. P., & Hazin, M. (2024). Evaluasi kebijakan kurikulum merdeka. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 23-29. Retrieved from: <https://www.almufi.com/index.php/ASH/article/view/276>.

- Dunn, W.N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Edisi Bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh M. Sofyan Effendi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, G.C. (1980). *Implementing public policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Fatmariyanti, Y. & Fauzi, A. (2023). Kebijakan publik versi William Dunn: Analisis dan implementasi. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1–9. DOI: <https://doi.org/10.31004/hj.v1i1.3>.
- Fika, N., Fauzi, A., Qurtubi, A., Sultan Maulana Hasanuddin Banten, U., Jendral Sudirman, J. N., Cipocok Jaya Kec Serang, P., & Serang, K. (2023). Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern. *Journal on Education*, 5(4), 16737–16747. Retrieved from: <http://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2861>.
- Grindle, M.S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton: Princeton University Press.
- Hartoko, B. (2024). *Manajemen kurikulum berbasis pendidikan karakter (Studi multi kasus Di SMPN 2 Widang dan di SDN Ngadirejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban)*. Doctoral dissertation. Gresik: Universitas Gresik.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Husaini, H. (2021). Integrasi nilai religius dalam pembelajaran MI/SD untuk membangun karakter siswa. *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education*, 4(1), 65–76. DOI: <http://doi.org/10.24014/ejpe.v4i1.12372>.
- Margerison, C.J. and Ravenscroft, M.D. (2020). Coordinating Character and curriculum for learning and development. *Journal of Work-Applied Management*, 12(1), 97–104. DOI: <https://doi.org/10.1108/JWAM-11-2019-0034>.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. California: SAGE Publications.
- Mujiburrohman, H.S.M. & Sulastini, R. (2021). Manajemen pengembangan kurikulum pendidikan karakter berbasis pesantren. *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, 5(2). <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.353>.
- Muslich, M. (2019). *Pendidikan karakter menjawab tantangan krisis multidimensi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Muslim, Yusri, Y., Sayafaruddin, Syukri, M., & Wismanto. (2023). Manajemen kepala sekolah dasar islam dalam mengembangkan pendidikan karakter religius di era disrupsi (Studi kasus Di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru). *Journal on Education*, 5(3), 10192-10204. Retrieved from: <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1913>.
- Mustopadidjaja, A.R. (2003). *Reformasi administrasi negara dalam rangka mendukung terwujudnya good governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- Nizar, A.R., Putra, A.S.Z., Al-fawwaz, A.C., Anggriani, F.L., and Damayanti, Z.A. (2025). Strategi pengembangan karakter siswa sekolah dasar di luar jam sekolah: Peran guru dan orang tua dalam era digital. *Nusantara Educational Review*, 3(1), 44–50. DOI: <https://doi.org/10.55732/ner.v3i1.1579>.
- Oktavia, P. and Khotimah, K. (2023). Pengembangan metode pembelajaran pendidikan agama islam di era digital. *An Najah Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan*, 2(5), 1–9. Retrieved from: <https://journal.nabest.id/index.php/annajah/article/view/167/118>.
- Onibala, N., Mantiri, J., & Sendouw, R. (2023). *Buku ajar analisis kebijakan publik*. Tondano: Tahta Media Group.
- Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). *Analisis kebijakan publik*. Surabaya: Unesa University Press.
- Purnawanto, A.T. (2022). Implementasi profil pelajar pancasila dalam pembelajaran kurikulum merdeka. *Jurnal Ilmiah Pedagogy*, 5(2), 76–87. DOI: <https://doi.org/10.63889/pedagogy.v15i2.139>.
- Rahmawati, E. & Hanafi, I.R. (2022). Internalisasi pendidikan karakter pelajar melalui pembentukan revolusi mental. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 1(2), 220–243. DOI: <https://doi.org/10.58561/jkpi.v1i2.38>.
- Stufflebeam, D.L., & Shinkfield, A.J. (2007). *Evaluation Theory, Models, and Applications*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Sucipto & Hidayati, D. (2023). Manajemen kurikulum berbasis karakter di era digital pada Muhammadiyah Boarding School (MBS) Weleri Kendal. *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, 9(3), 1955–1960. DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jime.v9i3.5765>.
- Susanto, S. (2021). Dampak inovasi pembelajaran berbasis karakter terhadap pengembangan karakter positif di SD Karakter Genius Islamic School Kota Depok. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 13(2), 687–708. DOI: <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i2.1066>.
- Ula, H., Suradji, M., and Mukhlis. (2024). Manajemen program pendidikan karakter dalam meningkatkan

- sikap sosial siswa di era disrupsi informasi. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 7(2), 349-362. DOI: <https://doi.org/10.52166/talim.v7i2.6837>.
- Utami, H.A. (2022). *Manajemen kurikulum berbasis karakter di sekolah dasar karakter genius islamic school*. Doctoral dissertation. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Van Meter, D.S., & Van Horn, C.E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. DOI: <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>.
- Yanti, N. (2023). *Implementasi kebijakan publik: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yayasan Al-Azhar Kelapa Gading. (2024). *Buku panduan manajemen kurikulum A-ICB*. Surabaya: SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading.